

BAB III

NAHDLATUL ULAMA DALAM MASA PENDUDUKAN JEPANG

Bagi kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, masa pendudukan Jepang di Indonesia dianggap masa suram. Masa ini ditandai dengan kebekuan usaha. Meskipun demikian sebagai oknum, anggota Nahdlatul Ulama tetap melaksanakan kewajiban organisasi di mana mungkin.

A. Latar Belakangnya Kondisi dan Situasi

1. Kondisi dan situasi politik

Masa tahun 1942 hingga tahun 1945 adalah masa peperangan di Indonesia antara Jepang dan Sekutu. Karena Indonesia dalam pendudukan Jepang, maka kondisi politik Indonesia adalah kondisi wilayah pendudukan. Maka harus tunduk pada pemerintah pendudukan. Pendudukan Jepang selama perang dunia ke-II terhadap Indonesia adalah bagian dari rencana global dalam pembentukan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya.¹ Di Indonesia politik itu tertubruk dengan kekuasaan yang sudah ada ialah Belanda, yang memihak kepada Sekutu. Dengan sendirinya tujuan Jepang di Indonesia adalah untuk memenangkan terhadap Sekutu. Tujuan itu menyebabkan daya dan kekuatan bangsa Indonesia dituangkan dalam peperangan. Seluruh potensi rakyat baik material maupun spiritual diarahkan untuk memenangkan perang. Sehubungan dengan masalah pengarahan potensi secara keseluruhan

¹ Nugroho Notosusanto; Tentra Peta, cetakan I, PT Gramedia, Jakarta, 1979, hal. 18.

lalu tidak boleh ada yang terbangun dalam arti tidak berguna untuk tujuan perang Jepang. Terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik Indonesia segera dilarang.²

Memang sesuai dengan peraturan yang ada, tidak akan menghentikan aktifitas yang bersifat sosial, budaya dan agama, tetapi sifat larangan berkumpul mungkin telah berpengaruh luas secara negatif di kalangan rakyat yang mungkin belum kuat dasar prinsipnya.

2. Kondisi organisasi Nahdlatul Ulama

Sebagai akibat daripada politik peperangan Jepang di Indonesia, Nahdlatul Ulama juga menerima pengaruh negatif. Sebagai organisasi sosial agama Nahdlatul Ulama merasa dibatasi gerakannya. Hal itu disebabkan adanya keharusan lapor untuk semua aktifitas yang dilakukan Nahdlatul Ulama yang ternyata tidak melulu bergerak dalam bidang agama. Kebutuhan lapor telah cukup menghambat gerakannya. Aktifitas rutin terutama acara sosial keagamaan tetap berjalan.

Kondisi Nahdlatul Ulama agak mengalami hambatan setelah Jepang menahan K.H. Hasyim Asyari, (Rais Akbar Nahdlatul Ulama) dipenjarakan terakhir di Surabaya.³ Dengan sendirinya Nahdlatul Ulama membatasi gerakannya. Sebetulnya masalah ini erat sekali hubungannya dengan

²Harri J. Benda; Bulan Sabit Matahari Terbit, terjemahan Daniel Dhabidoe), Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, hal. 142.

³Masbuhin, M. Sufyan Cholil; NU di Tengah-tengah Rakyat dan Bangsa Indonesia, Cet. I, Daya Bhakti, Kebumen. 1967, hal. 39.

penolakan orang-orang Islam untuk melaksanakan "Seikeri" atau membungkuk 90° ke arah Jepang pada tiap upacara yang dianggap sebagai tindak "ruku'" dalam sholat, maka tidak boleh.⁴ Sebenarnya masalah "seikeri" itu ditentang oleh umat Islam secara luas dan dari keloapok manapun. Malahan H. Rosul (Ayah Hamka) mungkin yang paling berani melontarkan tantangan terhadap seikeri ini.⁵

B. Beberapa Segi Usaha Nahdlatul Ulama

Masa antara 1942 hingga 1945 dianggap oleh kalangan Nahdlatul Ulama sendiri sebagai masa gelap. Hal ini disebabkan tidak banyaknya yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama. Situasi dan kondisi itu sebagai akibat politik pendudukan Jepang yang tidak saja dialami oleh Nahdlatul Ulama, melainkan juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Masa gelap atau kemacetan ini disebut sebagai Sirkel ke II.⁶ Hambatan itu tentu juga disebabkan adanya larangan atau setidaknya pembatasan aktifitas penerbitan (majalah dan sebagainya).

Hingga tahun 1942 Nahdlatul Ulama yang masih berpusat di Surabaya menerbitkan majalah-majalah seperti:

1. Soeara N.O.E, majalah tengah bulanan, pimpinan

⁴ Ibid.

⁵ James L. Peacock, Pembaharu Dan Pembaharuan Agama; (Terjemahan Muhajirin Darwin), PT Manindita, Yogyakarta, Cet. I, Tahun 1983, hal. 33.

⁶ H.Chalid Mawardi; Sirkel dan Teori Perkembangan Partai NU, Praktika Surabaya, t.t., hal. 5.

- Achmad Dahlan bin Moch. Ahid, No. 10 th. II terbit pada 1929, Nomor perdana pada 1927.
2. Berita N.OB, majalah bulanan, pimpinan Abdullah Oebayd, No. 7 th. VI terbit pada 1-2-1937, Nomor perdana pada 15 Nopember 1931.
 3. Suara Ansor, pimpinan A.F. Yasin No. 2 th. III terbit pada Mei 1940, Nomor perdana pada April 1937.
 4. Kemoedi N.OB, pimpinan Abdul Wahab Turham, No.2 th. IV terbit Juli 1941, Nomor perdana pada Juni 1937.⁷

Majalah itu berstatus pusat, maka tidak merupakan hasil aktifitas Nahdlatul Ulama daerah Jawa Timur. Sebagai majalah organisasi, juga berfungsi komunikatif dan instruktif, maka dengan berhentinya kegiatan penerbitan itu, selain komunikasi menjadi kurang lancar, juga koordinasi organisasi banyak mengalami hambatan.

Pemerintah Jepang di Indonesia, khususnya di Jawa memang melarang aktifitas sosial, pendidikan maupun agama. Dari segi komunikasi Nahdlatul Ulama, menderita hilangnya jejak perjuangan masa gelap itu pula. Tetapi sehubungan dengan adanya sifat organisasi, maka tindakan pusat dengan sendirinya merupakan pedoman bagi seluruh wilayahnya. Beberapa kebijaksanaan pusat ternyata bermanfaat dalam tindakan koordinasi terhadap wilayah pada saat-saat terjadi hambatan. Dalam keadaan yang seperti diuraikan di atas itu, Nahdlatul Ulama tetap

⁷ Untuk semua majalah di atas tidak diketahui jelas apakah pimpinan yang ada itu telah menjabat sejak penerbitan perdana.

melaksanakan fungsinya. Adapun beberapa segi perjuangan itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bidang keagamaan

Aktifitas dalam bidang ini merupakan aktifitas rutin, yang sejak lama dilakukan; aktifitas itu adalah "Lailatul Ijtima'" ialah berkumpulnya anggota Jam'iyah Nahdlatul Ulama (pria-wanita) tiap tanggal 15 Kalender hijriyah". Dalam kesempatan ini yang dipentingkan adalah refreasing terhadap jiwa anggota Nahdliyin dengan diisi penerangan agama. Kalau sekarang pematapan Nahdliyin dengan diisi penerangan agama, tanya jawab agama, sholat ghaib untuk warga Nahdlatul Ulama yang telah meninggal, dan tahlil untuk minta dan memintakan ampun serta rahmat bagi arwah muslimin.⁸ Acara itu dileksanakan di tiap langgar kampung dan kebanyakan tidak di masjid Jami', karena masjid Jami' bersifat umum, sedang langgar dapat bersifat khusus (dikelola oleh kelompok tertentu).⁹ Ternyata acara "Lailatul Ijtima'" tetap berjalan hingga dewasa ini dengan acara yang sama. Acara pertemuan tiap tanggal lima belasan ini besar sekali pengaruhnya kepada para anggota, seakan-akan mencipta - ken kerukunan hidup hingga turun-temurun dan sekaligus kesadaran berkeluarga besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga terpupuk.

Sebagai yang terlihat dewasa ini, materi pengajian agama selalu diulang-ulang. Juga materi disesuaikan -

⁸ K.H. Achmad Siddiq, Wawancara, tanggal 21 Mei 1981, di Jember.

⁹ K.H. Umar Burhan, Wawancara, Loc.cit.

kan dengan peristiwa penting pada bulan bersangkutan, kalau tidak masalah feqih. Senkan-akan mereka memiliki tahun ajaran yang dimulai dari bulan Syawal dan diakhiri menjelang bulan Ramadhan pada akhir bulan Sya'ban.

Pada bulan menjelang Ramadhan, biasanya pengajian diadakan dengan materi ajaran kesempurnaan kerohanian (tasawuf) seperti halnya diambil dari kitab Ihyau Ulumiddin. Adapun selanjutnya untuk bulan Ramadhan tidak diadakan pertemuan-pertemuan rutin seperti tersebut di atas ataupun pengajian, karena para anggota diharapkan akan membaca Al-Qur'an di rumah masing-masing ataupun di langgar-langgar terdekat.¹⁰ Ketaatan mereka untuk tetap ikut dalam acara di atas sejak dulu hingga sekarang, mungkin didukung oleh faktor kharisma Rois, dan mungkin juga rasa gotong royong kepentingan akhirat dan terikatnya batin mereka dengan leluhurnya. Jadi rasa kasih sayang kepada yang telah tiada. Sementara didorong anggapan bahwa mereka akan berkumpul, akan diselenggarakan usaha peringanan tanggungan bagi yang telah mendahuluiya.

Suatu contoh pemeliharaan agama bagi masyarakat, yang bertujuan mengintensifkan berfungsinya Islam dalam masyarakat. Arah intensifikasi itu tidak hanya terbatas pada kelompok warga Nahdlatul Ulama saja, tetapi pemeliharaan yang bersifat umum. Ini berarti menyangkut siapa saja yang beragama Islam. Tindakan seperti itu terjadi di wilayah Pasuruan di mana menyangkut beberapa hal. Satu menyangkut soal kiblat masjid Jami' Pasuruan

¹⁰ K.H. Machrus Ali; Kawancara, tanggal 27 Agustus 1981 di Kediri.

dan kedua mengenai masalah penolakan ketetapan peraturan pemerintah agar calon pengantin wanita datang ke kantor kenabian (kantor urusan agama kecamatan).

Soal kiblat masjid Jami' Pasuruan

Dengan adanya perbaikan masjid Jami' Pasuruan maka "Tonggak Bencet" (untuk menentukan waktu dzuhur) dipindahkan dari muka masjid ke sampingnya. Hal itu menyebabkan adanya laporan bahwa waktu berbuka puasa sering tidak tepat. Disusul lagi dengan pengaduan pihak luar bahwa kiblat masjid Jami' tidak tepat. Hal terakhir ini lebih parah lagi akibatnya karena menjelaskan dua kelompok yang pro dan yang kontra terhadap arah kiblat yang diperbaiki. Kedua kelompok itu saling bersitegang pendapat soal arah kiblat. Mereka saling tarik-menarik tikar dan menggesernya ke arah kiblat yang dikehendaki. Masjid tempat ketenangan yang suci untuk menghadap Tuhan telah berubah menjadi tempat pertikaian. Lebih tidak sesuai lagi dengan jiwa masjid, bahwa agaknya di antara mereka yang saling melakukan pertentangan tidak mengerti dengan jelas bagaimana arah kiblat yang "begini" mereka setuju dan mengapa arah kiblat yang "begitu" tidak mereka setujui. Mereka samsama ikut-ikutan saja.

Untuk menghilangkan suasana keruh dalam masyarakat, terutama di kalangan masjid, Bupati turun tangan dengan membentuk suatu panitia (komisi) pemeriksa kiblat masjid dengan suratnya pada tanggal 3 Juli 1936, terdiri dari Sayid Achmad Al Atas (Probolinggi), K. Mas Subadar (Besuki), K. Abduldjalil (Sidogiri Pasuruan).¹¹

¹¹Redaksi; "Gercesan Kiblat di Pasoeroean" Be-rita Mahdlatoel Celana, No. 12 th. ke VI, 15 April 1937 hal. 13.

Kutipan surat Bupati (Kanjeng Patih) Pasuruan

Paseroean, 8 Djoeli 1936

Kepada jang terhormat

Toean di

Dengan hormat !

Saja mempermakloemkan, bahwa sesoedahnja boelan Ramadian jang baroe laloe ada beberapa orang jang memberi tahoean pada saja bahwa waktoe² di masjid Djami' Paseroean sering tidak tjojok dengan waktoe loear kota, djoega ada jang bilang jang qiblat Masjid koerang sampurna.

Lantaran dari itoe, boeat menghilangkan ini perselisihan dan goena mengetahoei mana jang salah ataoe tidak benar, saja adakan commissi boeat periksa Mizwalah dan qiblat terseboet menceroet ilaoe falak dan kitab-kitab moe'tamad hal ini.

Maka jang saja toendjoekkan boeat djadi lid² Soamissi : 1 - t Sajid Moechammad Al-Athas Probolinggo. 2-t KJ. Abdoeldjalil Sidogiri, 3-t. KJ. Mat Seebadar Besuki.

Dari itoe saja minta pada toean nanti pada hari peperiksaan kira² 10 hari lagi t. datang di masjid kota kira² djam 9 pagi dengan membawa kitab² dan semoea pekakas jang ada, boeat keperluan itoe, perkokas jang koerang nanti akan disediakan oleh toean Sajid Moechammad Al-Athas.

Ini peperiksaan boleh djoega dihadiri oleh jang ada pengertian hal kodoea masalah itoe.

Wassalam

Patih Paseroean

(tidak bisa dibatja) ¹²

Pengkajian tentang kiblat di atas dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1936.¹³ Selain dilaksanakan oleh anggota panitia di atas, dihadiri pula oleh ulama Pasuruan dan orang-orang pemerintah. Pengkajian dilaksanakan ber-

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

dasarkan ilmu falak dan kitab-kitab mu'tamad seperti dinyatakan dalam surat patih.

Meskipun telah ada keputusan tentang pengkajian kiblat yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi rasa tidak puas tetap ada. Untuk menanggulangi masalah ini Nahdlatul Ulama cabang Pasuruan menyelenggarakan Majelis Syuro Umat Islam pada hari Sabtu malam, 6 Maret 1937.¹⁴ Madjlis ini bersifat tertutup, yang hadir tidak saja dari kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi dari kelompok-kelompok lain.

Diskusi kiblat itu didahului dengan diskusi tentang wajib tidaknya menghadap kiblat, berupa diperkenankan ikhtilaf (menyimpang dari kiblat), tentang kiblat perhitungan dan kiblat faktual (realita). Selanjutnya pada pengujung diskusi didahului dengan saling memanfaatkan dan kedamaian perasaan di antara yang bertentang-an.¹⁵

Agaknya akhir daripada diskusi itu akan berupa menguatkan hasil daripada pengkajian kiblat yang dilaksanakan oleh panitia Kepatihan. Hal ini terlihat dari sebagian besar ulama yang dipimpin oleh Ky.Sahal, tidak mau lagi mengambil keputusan baru karena Panitia Resmi (Bupati) telah memeriksanya berdasarkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Dan memang hingga dewasa ini, kiblat itu tidak

¹⁴Redaksi; "Oeresan Kiblat di Pasoeroean", Berita Nahdlatol 'Oelama, No.11, TH. ke 16, 1 April 1937.

¹⁵Redaksi "Oeroesan Kiblat di Pasoeroean", Berita Nahdlatol 'Oelama, (Samboengan Berita Nahdlatol 'Oelama, No. 13, TH, ke 6, 1 Mei 1937, hal. 15.

¹⁶Ibid.

berubah baik arah tikar apalagi arah bangunan. Semua ini berdasarkan pada keputusan pengkajian oleh Panitia Keputihan.¹⁷

Penolakan lapor ke kenaikan bagi calon penganten wanita

Dengan adanya kewajiban melapor bagi calon penganten perempuan untuk datang ke kenaikan (sekarang KUA Kecamatan), hal ini telah dirasa berat oleh umat Islam. Keberatan itu berdasarkan pada soal agama. Menanggapi hal itu, maka Nahdlatul Ulama Pasuruan pada tanggal 16 Agustus 1936, mengadakan musyawarah untuk membahas hal tersebut. Keputusan musyawarah itu berupa "memadjoekan soerat permohonan : 1 kepada Soepati Paseroean, 2. pada Penghoeloe Chakim jang maksoednja soe-hoen peratoeran jang mewadjibkan datangnja bakal penganten perempoean itoe soepaja dihapoeskan."¹⁸

Surat yang dikirim pada tanggal 22 Agustus 1936 ternyata mendapat jawaban yang menggembirakan pada tanggal 1 Februari 1937 sebagaimana tersebut di bawah ini.

Kutipan Surat Konjeng Bupati Pasuruan

Regent van Paseroean

No : A. 427/33, Paseroean, 1-2-1937.

Bijl :

Onderwerp : Hal memeriksa

bakal penganten perempuan.

Menarik soerat toean tanggal 22 Agustus 1936

¹⁷ Qosim Ilyas; Mawancara, tanggal 20 Oktober 1982.

¹⁸ Redaksi; "Warta Nahdlatol 'Celama", Tentang "Paseroean" dalam Berita Nahdlatol Celama; No. 10, tahun ke 6, 15 Maret 1937, hal. 10.

kami memberi ta'aruf bahwa berhoebong dengan soeratja Padoeka Kandjeng Toean Advisuer Voor Inlandsche Zaken tanggal 14 Djanoeari Jl No. 39/c, 10, peratoeran jang mewadjibkan datangnja oerang bakal penganten di Kantor Reaad agama stace di kenaiban tidak akan dilakoekan lagi, akan tetapi ada djoega kalanja bakal penganten perempuan perloe didatangkan di tempat-tempat terseboet seoeampama kalau perloe dipoetoos apakah iddahnja soedah lewat atau beloem. Boeat menguraikan hal itoe keterangan dari wakil sadja tidak mentjoekepi.

dd Bupati Paseroean
WG (tidak bisa dibatja)¹⁹

Dengan desikian Nahdlatul Ulama Pasuruan telah melaksanakan kewajiban organisasinya untuk umat Islam secara nyata.

2. Bidang sosial

Agaknya terdapat hambatan atau kemunduran dalam usaha ini. Secara formal organisasi Nahdlatul Ulama tidak menyelenggarakan usaha sosial terhadap masyarakat seperti panti asuhan, poliklinik dan sebagainya. Mungkin hal ini karena sulitnya penghidupan pada zaman Jepang. Usaha sosial dilaksanakan di antara anggota seperti usaha sosial kerohanian (tahlil) dan "persatuan kematian" artinya di antara anggota membayar iuran tertentu untuk membantu yang kematian dan didorong untuk melawat dan sedapatnya membawa bantuan bahan makanan. Hal ini sering dipakai sebagai ukuran "rukun" bagi anggota kelompok.²⁰

Usaha sosial besar artinya terhadap kelompok ang-

¹⁹ Ibid., hal. 11.

²⁰ K.H. Abdul Wahab Turham; Wawancara, tanggal 18 Nopember 1982, di Surabaya.

gota yang sakit. Dulu usaha sosial ini merupakan instruksi pengurus cabang, terutama juga pusat, tetapi kini dorongan keharusan moral di antara anggota lebih menipis lagi.²¹

Demikian usaha sosial Nahdlatul Ulama waktu itu, meskipun dalam keadaan sulit. Pengurus Besar ataupun Pengurus Cabang, memang tidak banyak berbuat untuk anggota, tetapi anggota digerakkan untuk menciptakan kelompok sosial. Hal ini mungkin dapat lebih mudah pengerahan dan menggerakkan anggota di mana diperlukan.²²

3. Bidang pendidikan

Nahdlatul Ulama melaksanakan aktifitas pendidikan meliputi baik pendidikan secara tradisional maupun pendidikan secara modern. Pendidikan secara tradisional seperti halnya Pondok Pesantren kebanyakan melanjutkan lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren yang sudah ada di mana ulama yang memimpin lembaga itu kebanyakan menjadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama setempat.²³

²¹ K.H. Saifuddin Suhri; Wawancara, tanggal 4 Maret 1981, di Surabaya.

²² K.H. Umar Burhan; Wawancara, loc.cit.

²³ Pondok Pesantren Asem Bagus Sukorejo berdiri tahun 1914. Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang berdiri tahun 1899. Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan berdiri tahun 1913. Pondok Pesantren Tremas Pacitan berdiri pada tahun 1892. Pondok Pesantren sendiri pada mulanya lebih merupakan usaha perorangan selanjutnya para pemimpin pondok mungkin karena sekaligus sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama (anggota Syuriah), maka pengelolaan pondok yang dibawah pimpinannya itu dianggap sebagai amanat Nahdlatul Ulama; tentu saja untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama dalam bidang agama. Wawancara: dengan pimpinan pondok Asem Bagus Sukorejo, tanggal 5-10-1983, dengan pimpinan pondok Tebu Ireng, tanggal 27-9-1983, dengan pimpinan pondok Sidogiri tanggal 30-9-1983, dengan pimpinan pondok Tremas tanggal 10-9-1983.

Pengelolaan organisasi terhadap lembaga itu sebagian besar terbatas kepada menentukan garis besar mata pelajaran. Dalam hal ini diarahkan untuk mendukung cita-cita organisasi dalam bidang agama.

Di samping itu, Nahdlatul Ulama juga melaksanakan pendidikan dengan cara baru, maksudnya pendidikan itu dilaksanakan dengan cara-cara pendidikan barat, seperti rencana pelajaran, pelaksanaan belajar mengajar, ketentuan alokasi waktu dan sebagainya. Pada mulanya madrasah Nahdlatul Ulama belum mempunyai kurikulum pelajaran umum hingga tahun 1930.²⁴ Setelah tahun itu selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran umum yang kebanyakan masih terbatas dalam hal membaca dan menulis; selanjutnya berkembang lagi seperti pelajaran berhitung. Sejarah Islam, meskipun tidak bersifat agama, sudah diberikan sejak berdirinya lembaga itu; dan bahkan di pondok pesantrenpun sejak awal sudah dipelajarkan tentang Tarekh Islam terbatas pada masa ke-Rasul-an, Khulafaur rosyidin dan pahlawan-pahlawan Islam. Sampai dengan tahun 1940 di Jawa Timur sudah terdapat 186 madrasah (lihat lampiran Ke-II).²⁵ Istilah madrasah sekaligus menunjukkan tingkatan sekolah itu sederajat dengan sekolah dasar. Jika bermaksud menunjukkan tingkatan selanjutnya langsung disebutkan sekolah Tsanawiyah untuk menunjuk setingkat dengan SMTP dan Aliyah untuk

²⁴K.H. Abdul Wahab Turham; wawancara, tanggal 26 9-1983 di Surabaya.

²⁵Program Konggres II NU ke IV di Surabaya; Hoofd Comite Congres ke XV di Surabaya, 1940, halaman 58. Lihat Lampiran ke I, hal. 88.

menunjuk setingkat dengan SMTA.²⁶

Agaknya kemajuan usaha pendidikan Nahdlatul Ulama lebih banyak ditentukan oleh perkembangan kemajuan anggota dalam menerima atau menghadapi perkembangan masyarakat. Hal ini sejajar dengan gejala umum bahwa; pada kota-kota besar dengan ekonomi kuat dan penemuan terbuka, maka masyarakat lebih gampang untuk maju. Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Situbondo juga terkenal dengan masyarakat santri, tetapi hanya mempunyai satu madrasah. Mungkin hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pendidikan formal (cara barat) meskipun dengan materi cara tradisional (pondok). Surabaya, Malang, dan Jember, menduduki tempat penting dalam kemajuan, tidak lain karena pengaruh kemajuan masyarakat dan pemimpin Nahdlatul Ulama lebih giat.

Sebaliknya bahwa pada kota-kota besar itu tidak terdapat pondok-pondok hanya terdapat agak jauh keluar kota. Maka yang miskin madrasah malahan kaya akan pondok pesantren. Pengembangan madrasah dalam arti sekolah yang dikelola oleh golongan agama, merupakan usaha realisasi tentang langkah yang diambil oleh Nahdlatul Ulama pada 1356 H atau 1938 M dengan dikeluarkannya peraturan tentang susunan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharam 1357 H (1938 M).

Susunan madrasah Nahdlatul Ulama sebagai berikut :

1. Madrasah Awaliyah, lama belajar 2 tahun

²⁶K.H. Abdul Wahab Turham; wawancara; loc.cit.

2. Madrasah Ibtidaiyah lama belajar 3 tahun
3. Madrasah Tsanawiyah lama belajar 3 tahun
4. Madrasah Muallimin Musto lama belajar 3 tahun
5. Madrasah Muallimin Ulya lama belajar 3 tahun.²⁷

Terlihat bahwa Nahdlatul Ulama juga mengembangkan rencana pendidikannya. Hal itu dapat dipandang sebagai langkah maju, karena menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat atau juga karena dorongan cita - cita organisasi.

4. Bidang politik militer

Sebenarnya Nahdlatul Ulama memang tidak didirikan dengan tujuan politik, apalagi militer, tetapi Nahdlatul Ulama ternyata dalam perjuangannya tidak pernah menolak tantangan. Aktifitas dalam bidang politik yang juga bersifat kemiliteran hanya sebagai konsekuensi pejuang keagamaan secara luas. Politik pendudukan militer Jepang memaksa rakyat Indonesia apalagi Jawa dalam kesiagaan perang. Meskipun organisasi sosial dan agama tidak dilarang, tetapi pendayagunaan potensi selain untuk kepentingan Jepang, harus berhenti. Sebaliknya dalam hal ini bahwa Jepang telah ternyata berusaha mendekati golongan Islam untuk mencari dukungan.²⁸ Hal ini antara lain disebabkan latar belakang hubungan rakyat Islam dengan pemerintah Belanda dan hakikat semangat dalam agama sendiri.

Masalah politik yang disentuh Nahdlatul Ulama meskipun bersifat agama adalah menolak keharusan "Seikerei" yaitu menghormat seperti "rukū'" ke arah istana Jepang.²⁹

²⁷ Mahmud Yunus; Op. cit. hal. 241-242.

²⁸ H.J. Benda; op. cit., hal. 56.

²⁹ Ibid., hal. 123.

Hal ini menyebabkan salah paham hubungan Jepang dengan orang Islam, tetapi Jepang akhirnya menyadari kekeliruannya. Dengan sendirinya penolakan "Seikerei" meluas di seluruh wilayah Nahdlatul Ulama terutama dalam pertemuan tidak resmi, juga di Jawa Timur.

Dalam kemelut politik peperangan, Jepang terpaksa membentuk PETA, yang didukung oleh sejumlah besar tokoh nasional, tokoh Islam maupun bangsawan.³⁰ dan karena kepercayaan Jepang di mana golongan nasionalis tersebut telah melancarkan pengabdian kepada Jepang dengan organisasi "Jawahokokai".³¹ yang berarti pengabdian rakyat Jawa.

Untuk ini Nahdlatul Ulama menuntut adanya pasukan di lingkungan pemuda Islam, maka berdirilah Hisbullah dan lulu Sabilillah yang dikelola oleh Masyumi di mana Nahdlatul Ulama ikut aktif di dalamnya.³²

Hisbullah segera meluas di pelosok daerah Jawa Timur terutama pondok pesantren sebagai basisnya. Tiap cabang mempunyai pasukan setingkat dengan kompi ± 350 orang. Sedangkan untuk Sabilillah tiap cabang Nahdlatul Ulama mempunyai pasukan yang terdiri dari 75 orang secara organisatoris pasukan Hisbullah dan Barisan Sabilillah itu masuk di dalam organisasi Masyumi di samping organisasi-organisasi lainnya. Biasanya dari tokoh-to-

³⁰ Nugroho Notokusanto; Op. cit., halaman 72.

³¹ Chalid Mawardi; Praktika Politika, Praktika, Surabaya, t.th., hal. 23.

³² Syaifuddin Zuhri; KU Dalam Pengembangan Islam dan Pembelaan Tanah Air (dalam Kebangkitan Islam). Pustaka Abad XV H, 1982, hal. 129.

koh pemuda Ansor, dia juga menjabat sebagai pimpinan Hisbullah, dan dari tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup tua juga menjadi pimpinan Sabilillah. Abu Mansur (almarhum) adalah tokoh pemuda Ansor juga pimpinan Hisbullah, sedang K. Dahlan (almarhum) bekas menteri Agama RI, dia adalah tokoh Nahdlatul Ulama Pasuruan juga komandan Sabilillah Pasuruan.³³ Ternyata bahwa kepengurusan Hisbullah dan Sabilillah memang tidak seluruhnya terdiri dari orang-orang yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, seperti halnya di Surabaya.

Ketua : Chusaini Tiway

Nakil Ketua : Muhammad

Penulis : R.M. Sumandar

Bendahara : M. Dja'far

Penerangan/Penghubung : Bey. Arifin.

Ternyata menurut terwawancara, bahwa Bey Arifin, Muhammad dan R.M. Sumandar bukan berasal dari anggota Nahdlatul Ulama.³⁴

Hingga akhir zaman Jepang secara operasional baik Hisbullah maupun Sabilillah tidak berfungsi. Mereka belum kelihatan sebagaimana diharapkan Jepang dalam fungsinya. Demikian pula PETA pun belum bisa difungsikan oleh Jepang sebagaimana mestinya.

Hisbullah memang sama derajatnya dengan PETA keduanya sama-sama dilatih oleh orang Jepang (Kapten Kasagawa). Kalau PETA kelahirannya dikehendaki oleh seluruh lapisan dan kelompok bangsa Indonesia.³⁵ Tetapi His-

³³ Qosim Ilyas; Wawancara, loc. cit.

³⁴ K.H. Chusaini Tiway Wawancara tanggal 10 Desember 1983 di Surabaya.

³⁵ Nugroho Notosusanto, Loc. cit.

bulah timbulnya merupakan inisiatif Umat Islam.³⁶

Selain daripada itu, bahwa dengan Hisbullah, organisasi kelompok Islam telah mempunyai cadangan kekuatan fisik untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan politik menyosong kemerdekaan.

³⁶ Saifuddin Zuhri; Op. cit., halaman 129.